



KR-Surya Adi Lesmana
RAMADAN DI MASJID AGUNG: Jamaah menjalankan salat di Masjid Agung Dr Wahidin Soedirohoesodo Sleman. Selama bulan Ramadan, masjid ini tak pernah sepi dari jamaah yang menjalankan ibadah salat wajib maupun kegiatan lain dan mereka tetap tertib menerapkan protokol kesehatan.

Komisi D Pantau Kesiapan PTM

SLEMAN (KR) - Komisi D DPRD Kabupaten Sleman melakukan pemantauan ke sekolah dalam rangka kesiapan pembelajaran tatap muka (PTM). Dengan harapan ketika nanti pembelajaran tatap muka, protokol kesehatan diterapkan dengan ketat sehingga tidak menimbulkan klaster baru.

Anggota Komisi D DPRD Sleman Suryono menjelaskan, pemerintah telah menargetkan pada tahun ajaran baru nanti pembelajaran akan dilakukan secara tatap muka. Untuk itu Komisi melakukan pemantauan di beberapa sekolah. "Pemantauan ini untuk melihat kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Terutama untuk penerapan protokol kesehatan, seperti tempat cuci

tangan, cek suhu badan dan jarak tempat duduk siswa di dalam kelas," ujarnya di Sleman, Jumat (16/4).

Menurut Suryono, secara keseluruhan sekolah-sekolah sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Bahkan pihaknya juga mendukung program pembelajaran tatap muka

untuk segera dilaksanakan. "Yang jelas kami sangat mendukung ketika nanti pemerintah sudah memperbolehkan pembelajaran tatap muka digelar. Namun protokol kesehatan harus ketat supaya tidak menimbulkan klaster baru," tegas anggota Fraksi Golkar ini.

(Sni)-f



KR-Istimewa
Anggota Komisi D saat meninjau di salah satu sekolah.

Jelang Lebaran, Polri Intensifkan Imbauan Prokes

SLEMAN (KR) - Jelang Lebaran, Polri semakin intens melaksanakan imbauan terkait protokol kesehatan (prokes). Salah satunya, dilakukan petugas Polsek Prambanan yang rutin turun ke jalan bersama instansi terkait.

Tak hanya blusukan ke tempat keramaian, petugas Polsek Prambanan setiap hari melakukan operasi yustisi dan imbauan prokes



KR- Dok Polsek Prambanan
Kompol Rubiyanto memimpin langsung imbauan tertib prokes.

kepada para pengguna jalan. Kapolsek Prambanan Kompol Rubiyanto SH MH mengakui, masih ditemukan pelanggaran prokes, saat melakukan operasi yustisi. "Paling sering, kita mendapati masyarakat yang tidak memakai masker, namun jumlahnya tidak signifikan karena kesadaran masyarakat makin tinggi," jelasnya, Jumat (16/4).

Dikatakan, mereka yang melanggar, selain diberikan teguran juga mendapatkan masker dan diminta untuk langsung dipakai. Selain itu, petugas juga masih menemu-kan sejumlah warga yang memakai masker tidak benar yakni di bawah hidung. Blusukan untuk mengingatkan prokes, juga dilakukan petugas dengan masuk ke pabrik-pabrik yang ada di Prambanan. Petugas memastikan, agar pihak perusahaan sudah menerapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai upaya mencegah penularan Covid-19.

AKP Rubiyanto menyebut, jajarannya dengan instansi terkait juga intens melakukan imbauan protokol kesehatan di tempat wisata. "Imbauan protokol kesehatan juga kami gaungkan di tempat wisata, baik kepada pengelola maupun wisatawan," tandasnya.

(Ayu)-f

IKUT VAKSINASI COVID-19 Lansia Jabung Diboyong ke RSUD Sleman

SLEMAN (KR) - Padukuhan Jabung Kalurahan Pandowoharjo Sleman layak menjadi contoh bagaimana masyarakat suatu dusun sederhana bergotong royong melawan wabah Covid-19. Selain melaksanakan berbagai program protokol kesehatan berbasis masyarakat secara disiplin, warga Jabung membuat kejutan dengan memboyong para lansia ke RSUD Sleman untuk menjalani vaksinasi Covid-19 bersama.

"Karena tidak semua lansia dapat mengakses internet, warga mengawali langkah kreatif mereka dengan melakukan edukasi tentang vaksinasi, kemudian mendata dan mendaftarkan lansia di padukuhan mereka secara kolektif. Setelah informasi jadwal vaksinasi di RSUD Sleman didapatkan, mereka kemudian menghubungi para lansia agar bersiap. Tidak semua lansia memiliki keluarga yang dapat mengantarkan mereka

ke RSUD Sleman, sehingga warga Jabung kemudian menyiapkan transport dan tim pendamping bagi para lansia," ungkap Direktur RSUD Sleman dr Cahya Purnama, kemarin.

Para lansia yang mengalami kesulitan dibimbing oleh tim pendamping dari padukuhan saat menjalani prosedur pendaftaran ulang, pemeriksaan kesehatan hingga vaksinasi selesai. "Untuk menghormati inisia-

tif warga dalam melestarikan budaya gotong royong dan membantu para lansia, RSUD Sleman menyiapkan penjadwalan khusus untuk vaksinasi Covid-19 lansia yang dikoordinir secara kolektif oleh warga. Dengan penjadwalan vaksinasi khusus tersebut diharapkan seluruh lansia dapat turut serta dalam vaksinasi dan lebih nyaman menjalani vaksinasi bersama sesama warga," kata dr Cahya. (Has)-f



KR-Istimewa
dr Cahya bersama lansia warga Jabung yang siap divaksin.

PEMKAB MULAI LAKUKAN PENANGANAN

159 Padukuhan di Sleman Rawan Kumuh

SLEMAN (KR) - Sebanyak 159 padukuhan di Kabupaten Sleman termasuk rawan kumuh. Agar kawasan itu tidak menjadi kumuh, mulai tahun ini Pemkab Sleman melakukan beberapa penanganan.

Kasi Perumahan Swadaya Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman Suwarsono menjelaskan, sebanyak 159 padukuhan itu tersebar di 17 kapanewon. Untuk indikator padukuhan yang masuk rawan kumuh yaitu keteraturan bangunan, akses jalan, drainase, air bersih, sampah dan akses kebakaran. Untuk itu, Pemkab Sleman

akan melakukan penanganan dalam rangka pencegahan supaya tidak menjadi kumuh.

"Kami akan melakukan penanganan terhadap beberapa indikator itu. Ketika itu tidak dilakukan penanganan, ya nanti padukuhan rawan kumuh akan menjadi kumuh," jelas Suwarsono di kantornya, Jumat (16/4).

Diterangkan, penanganan itu nantinya akan berupa program kegiatan

yang menggunakan sumber dana dari APBD. Dalam pelaksanaan program tersebut akan melibatkan masyarakat setempat. "Ketika nanti identifikasi masalah dan perencanaan, akan melibatkan masyarakat. Termasuk masalah utama yang perlu diselesaikan dulu. Kemudian saat penyusunan DED, kami butuh masukan dari masyarakat setempat," paparnya.

Setelah program kegiatan selesai, nantinya akan dihibahkan kepada masyarakat. Dengan harapan, hasil pembangunan tersebut dapat dipelihara dan dijaga oleh masyarakat. "Ketika nanti kami hibah-

kan ke masyarakat, supaya mereka ikut menjaga. Sehingga nantinya tidak cepat rusak," terangnya.

Sedangkan untuk kawasan kumuh, menurut Suwarsono, ada 45 titik di 17 kalurahan dan 6 kapanewon. Meliputi Tirtoadi, Sendangadi, Tlogoadi dan Sinduadi Mlati, Banyuraden, Nogotirto, Ambarketawang dan Trihanggo Gamping.

"Kemudian berada di Sidoarum, Sidoagung, Sidomoyo Godean, Bimomartani dan Wedomartani Ngemplak, Sariharjo, Sardonoarjo Ngaglik, Condongcatur dan Caturtunggal Depok," paparnya. (Sni)-f

WABUP SILATURAHMI KE WARGA UMBULHARJO

Pertanian Jangan Hanya Jadi Sampingan

CANGKRINGAN (KR) - Sektor pertanian dan peternakan di Kalurahan Umbulharjo Cangkringan memang mendapat perhatian lebih. Sebab, sebagian besar warga Umbulharjo bergelut dalam dua bidang tersebut.

"Saya berharap wilayah Umbulharjo menjadi lahan pertanian hortikultura dan ternak sapi. Selain itu, pertanian dan peternakan bisa menjadi fokus mata pencaharian dan terus di kembangkan di wilayah tersebut. Ada ataupun tidak ada Covid, setiap orang pasti butuh bahan pangan, sehingga saya harap pertanian dan ternak tidak hanya menjadi mata pencaharian sampingan, tapi yang utama," ujar Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa saat bersilaturahmi ke petani dan peternak Sidomakmur di Padukuhan Pangukrejo Umbulharjo Cangkringan, kemarin.

Wabup Danang juga meminta ma-



KR-Istimewa
Wabup Danang menanam bibit pohon apel di Pangukrejo.

syarakat semangat untuk kembali menggalakkan sektor pertanian, peternakan juga pariwisata. "Terlebih potensi peternakan cukup potensial untuk mendukung sektor pertanian

dari kotoran dapat diolah menjadi kompos untuk pupuk pertanian, juga siap untuk memanfaatkan mengolah biogas untuk kebutuhan rumah tangga," tandasnya. (Has)-f

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TA 2020							  						
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019													
NO URUT	URAIAN	Reff	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	NO URUT	URAIAN	Reff	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
67	TRANSFER	5.1.2					67	TRANSFER	5.1.2				
68	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	5.1.2.4					68	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	5.1.2.4				
69	Bagi Hasil Pajak	5.1.2.4.a	46.277.000.000,00	46.216.014.556,00	99,87	62.393.658.751,00	69	Bagi Hasil Pajak	5.1.2.4.a	46.277.000.000,00	46.216.014.556,00	99,87	62.393.658.751,00
70	Bagi Hasil Retribusi	5.1.2.4.a.2	0,00	0,00	0,00	0,00	70	Bagi Hasil Retribusi	5.1.2.4.a.2	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.2.4.a.3	5.485.000.000,00	4.482.233.397,00	81,72	6.754.061.225,00	71	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.2.4.a.3	5.485.000.000,00	4.482.233.397,00	81,72	6.754.061.225,00
72	Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa		51.762.000.000,00	50.698.247.953,00	97,94	69.147.719.976,00	72	Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa		51.762.000.000,00	50.698.247.953,00	97,94	69.147.719.976,00
73	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN	5.1.2.4.b					73	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN	5.1.2.4.b				
74	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.2.4.b.1	1.620.000.000,00	105.140.870,00	6,49	792.971.390,00	74	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.2.4.b.1	1.620.000.000,00	105.140.870,00	6,49	792.971.390,00
75	Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.2.4.b.2	253.644.143.300,00	147.768.267.300,00	58,26	267.521.493.614,00	75	Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.2.4.b.2	253.644.143.300,00	147.768.267.300,00	58,26	267.521.493.614,00
76	Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.2.4.b.3	2.180.000.000,00	0,00	0,00	1.689.001.912,49	76	Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.2.4.b.3	2.180.000.000,00	0,00	0,00	1.689.001.912,49
77	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan		257.444.143.300,00	147.873.408.170,00	57,44	270.003.466.916,49	77	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan		257.444.143.300,00	147.873.408.170,00	57,44	270.003.466.916,49
78	Jumlah Transfer		399.206.143.300,00	198.571.656.123,00	64,22	339.151.186.892,49	78	Jumlah Transfer		399.206.143.300,00	198.571.656.123,00	64,22	339.151.186.892,49
79	Jumlah Belanja dan TRANSFER		2.908.092.312.851,78	2.532.169.209.185,59	87,07	2.776.995.369.322,82	79	Jumlah Belanja dan TRANSFER		2.908.092.312.851,78	2.532.169.209.185,59	87,07	2.776.995.369.322,82
80							80						
81	SURPLUS/DEFISIT	5.1.2.5	369.726.650.741,78	8.881.661.427,14	2,40	63.640.916.480,63	81	SURPLUS/DEFISIT	5.1.2.5	369.726.650.741,78	8.881.661.427,14	2,40	63.640.916.480,63
82							82						
83	PEMBIAYAAN	5.1.3					83	PEMBIAYAAN	5.1.3				
84	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1					84	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1				
85	Penggunaan SIPA		398.584.982.878,78	398.584.982.878,78	100,00	403.042.566.398,15	85	Penggunaan SIPA		398.584.982.878,78	398.584.982.878,78	100,00	403.042.566.398,15
86	Penerimaan Modal Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00	86	Penerimaan Modal Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
87	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00	87	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
88	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00	88	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
89	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	89	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
90	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00	90	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
91	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00	91	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
92	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00	92	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00
93	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	93	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
94	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00	0,00	94	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00	0,00
95	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	95	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
96	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	96	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
97	Jumlah Penerimaan		398.584.982.878,78	398.584.982.878,78	100,00	403.042.566.398,15	97	Jumlah Penerimaan		398.584.982.878,78	398.584.982.878,78	100,00	403.042.566.398,15
98	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2					98	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2				
99	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00	99	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
100	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah Negeri - Pemerintah Pusat		24.981.701.137,00	23.044.201.137,00	92,24	61.078.500.000,00	100	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah Negeri - Pemerintah Pusat		24.981.701.137,00	23.044.201.137,00	92,24	61.078.500.000,00
101	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00	101	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
102	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	102	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
103	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		3.876.631.000,00	3.876.631.000,00	100,00	7.020.000.000,00	103	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		3.876.631.000,00	3.876.631.000,00	100,00	7.020.000.000,00
104	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00	104	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
105	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00	105	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00
106	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	106	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
107	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00	0,00	107	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00	0,00
108	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	108	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
109	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	109	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00	0,00	0,00	110	Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00	0,00	0,00
111	Jumlah Pengeluaran		28.858.332.137,00	26.920.832.137,00	93,29	68.098.500.000,00	111	Jumlah Pengeluaran		28.858.332.137,00	26.920.832.137,00	93,29	68.098.500.000,00
112	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.3.3	369.726.650.741,78	371.664.150.741,78	100,52	334.944.066.398,15	112	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.3.3	369.726.650.741,78	371.664.150.741,78	100,52	334.944.066.398,15
113	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	5.1.4	0,00	380.545.812.168,92	100,00	398.584.982.878,78	113	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	5.1.4	0,00	380.545.812.168,92	100,00	398.584.982.878,78
114							114						



Sleman,
BUPATI SLEMAN,



KUSTINI SRI PURNOMO